© 2025 The Author(s). Published by Puslitbang Polri. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

ISSN 1411-3813 | E-ISSN 2684-7191
DOI: 10.46976/litbangpolri.v28i1.297

Peran Polri dalam Mendukung Pemulihan dan Percepatan Ekonomi Nasional Tahun 2024

Dadang Sutrasno[1], Rizki Saputra[1], Ajeng Hananingrum[1]
[1]Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri
[1]*Bidgasopsnal@gmail.com*

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has led to a global economic decline, with economic growth decreasing by 5.2% (World Bank, 2020). The efforts of the Indonesian National Police (Polri) in maintaining security and public order have indirectly contributed to the economic stability. The Research and Development Center of Polri conducted a study on Polri's role in supporting the national economic recovery and acceleration. This study used mixed-method approach. The quantitative analysis was using the Analytical Hierarchy Process and the qualitative analysis was using Focus Group Discussions. Secondary data was obtained from BPS (Statistics Indonesia), Polri's internal sources, and other documents related to Polri's policies and government policies. Primary data was collected through observations, interviews, discussions, and surveys. The results are: 1) The implementation of activities in each operational function has not yet been directed towards enhancing the economy. 2) Public expectations revealed that 46.76% of respondents believed that the relationship between public security and economic recovery is progressing in line with the challenges, which have been addressed. 3) The Police's involvement in economic recovery and acceleration requires coordination and collaboration, both within operational functions and with stakeholders. 4) The police's involvement in economic recovery and acceleration should be complemented by improvements in the capacity and capability of its personnel. Challenges requiring active police involvement include: 1) Ensuring a sense of security in economic activities. 2) Economic recovery and acceleration in certain regions indicate challenges such as potential security disturbances caused by youth unemployment.

***Keyword**: National Economic Recovery, Public Security, National Stability.*

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan ekonomi global dengan pertumbuhan ekonomi sebesar negatif 5,2% (World Bank, 2020). Upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara tidak langsung berkontribusi terhadap kondusifitas perekonomian. Untuk itu Puslitbang Polri melakukan penelitian tentang peran Polri dalam mendukung pemulihan dan percepatan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan *mix method,* teknik pengolahan dan analisis menggunakan teknik kuantitatif *analytical hierarchy process* (AHP) dan kualitatif dengan melakukan fokus group diskusi (FGD) dengan narasumber dari internal Polri dan perwakilan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari BPS, internal Polri serta dokumen pendukung lain terkait kebijakan Polri dan kebijakan pemerintah. Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, diskusi dan survei. Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) Pelaksanaan kegiatan setiap fungsi operasional masih belum terarah kepada peningkatan perekonomian; 2) Hasil perhitungan kuantitatif atas ekspektasi masyarakat dimana 46,76% menilai hubungan kamtibmas dan pemulihan ekonomi berjalan sesuai kondisi tantangan yang ada telah dapat ditangani; 3) Pelibatan kepolisian untuk pemulihan dan percepatan ekonomi membutuhkan koordinasi dan kolaborasi baik antar fungsi operasional maupun dengan para pemangku kepentingan lain; 4) Keterlibatan kepolisian dalam pemulihan dan percepatan ekonomi harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota. Tantangan yang memerlukan peran aktif kepolisian antara lain 1) Terjaminnya rasa aman dalam menjalankan aktivitas ekonomi; 2) Pemulihan dan percepatan ekonomi di beberapa wilayah mengindikasikan tantangan berupa potensi gangguan keamanan yang diakibatkan pengangguran usia muda.

Kata kunci: Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamtibmas, Stabilitas Nasional.

PENDAHULUAN

Kejadian pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa sehingga pertumbuhan ekonomi global maupun domestik mengalami penurunan. Tentunya hal ini berimbas terhadap kehidupan ekonomi, sosial masyarakat yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Pada aspek ekonomi terlihat pada penurunan pendapatan masyarakat yang menimbulkan lemahnya daya beli sebagai akibat dari terhentinya aktivitas ekonomi di masyarakat. Hal tersebut diatas bermuara pada kemiskinan sehingga berpotensi pada gangguan kamtibmas yang dapat mengganggu perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07 % di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.

Kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dialami banyak negara terlihat dari pertumbuhan ekonomi global yang mengalami penurunan 5,2% (*World Bank*, 2020). Aktivitas perekonomian terhenti akibat dari kebijakan karantina wilayah (*lock down*) yang diberlakukan disetiap negara. Akibatnya suplai dan produksi terganggu mengakibatkan lonjakan harga pangan dan energi serta dapat dipastikan terjadi penurunan perdagangan dan konsumsi. Upaya pengurangan dampak dari pandemi dilakukan oleh negara dengan membuat kebijakan untuk melindungi mata pencaharian masyarakat sebagai sumber pendapatan. Begitupun dengan Polri yang secara konsisten menjalankan kegiatan yang mengarah pada pemulihan dan percepatan ekonomi nasional.

Pemulihan penting dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari penurunan pada bidang kesehatan dan ekonomi. Sementara percepatan diperlukan untuk menjamin proses keberlanjutan pembangunan terjaga dan mengarah ke perekonomian yang tangguh. Polri memberikan kontribusi dalam pemulihan dan percepatan perekonoman Nasional telah diarahkan dalam 16 program prioritas Kapolri. Salah satu dari enam belas program prioritas Kapolri tersebut adalah "Pemulihan Ekonomi Nasional".

Walaupun bukan sebagai pelaku ekonomi namun peran Polri dalam menjaga stabilitas kamtibmas secara tidak langsung berkontribusi dalam menciptakan kondusifitas perekonomian. Keterkaitan antara pembangunan ekonomi dan keamanan sangat kuat dan merupakan hubungan yang timbal balik (Karnavian, 2018). Pertumbuhan ekonomi membutuhkan stabilitas keamanan, dilaksanakan secara sinergis dan saling mendukung sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan ketahanan Nasional (Kusmanto, 2016). Peningkatan kegiatan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat kejahatan (pelangaran hukum) akan berkurang, juga sebaliknya.

Keterlibatan Polri dalam pemulihan dan percepatan ekonomi nasional, juga disampaikan oleh Kapolri dalam Rapim Polri tahun 2023 yang mengangkat tema transformasi ekonomi yang inklusif. Sekaligus menjadi tugas tambahan bagi fungsi operasional Polri (Intelkam, Binmas, Lalu Lintas, Sabhara, dan Reskrim). Fungsi Intelkam melakukan deteksi terhadap berbagai gejolak ekonomi seperti kenaikan harga bahan pokok, penimbunan barang, dll. Fungsi Binmas jauh sebelum pandemi Covid 19 telah melakukan berbagai inovasi untuk mendorong ekonomi masyarakat pedesaan. Fungsi Lalu Lintas melakukan pengaturan agar mobilitas barang dan orang, sehingga terjamin keselamatan dan keamanan. Fungsi Sabhara melakukan pengendalian aktivitas yang berpotensi mengganggu kegiatan ekonomi. Fungsi Reskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan kejahatan ekonomi yang dapat mengganggu kegiatan ekonomi secara luas.

Dengan berkembangnya berbagai kejahatan ekonomi dengan modus operandi baru di tengah masyarakat dapat berpotensi mengganggu stabilitas kamtibmas. Pemanfaatan media digital dalam kegiatan usaha tetap berpotensi disalahgunakan pada saat mengarah pada perdagangan yang melanggar hukum. Jaminan keselamatan dan keamanan kegiatan distribusi dan mobilitas barang dan orang, menjadikan kehadiran fungsi operasional Polri penting. Sehingga penting untuk mengukur kinerja fungsi-fungsi operasional Polri tersebut agar pemulihan dan percepatan ekonomi Nasional dapat optimal tercapai di tengah kendala internal maupun eksternal yang ada.

Oleh karena maka Puslitbang Polri sebagai pengemban fungsi Litbang dan garda utama di bidang riset dan kajian di Tahun 2024 perlu melakukan penelitian terkait dengan "**Peran Polri dalam Mendukung Pemulihan dan Percepatan Ekonomi Nasional**" dengan harapan hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi pimpinan Polri dalam mengambil kebijakan guna mendukung program pemulihan dan percepatan ekonomi nasional, sehingga Polri dapat

memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat guna terwujudnya Polri yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan (PRESISI).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif atau sering disebut sebagai *mix methods*. Pengumpulan data kuantitatif akan memanfaatkan teknik *analytical hierarchy process* (*AHP*) yaitu metode yang tersusun secara terstruktur untuk mengelompokkan dan menganalisis keputusan kompleks (*complex decisions*) berbasis pendekatan matematika dan psikologi (Forman dan Saul, 2001). Metode kualitatif dilakukan dengan wawancara melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan narasumber terpilih baik dari internal Polri dan eksternal (perwakilan masyarakat).

Data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui observasi lapangan, wawancara, diskusi terfokus dan survei. Sementara data sekunder didapat dari BPS, internal Polri serta dokumen terkait kebijakan polri dan pemerintah tentang pemulihan dan percepatan ekonomi nasional

Unit analisis yang ditentukan untuk menjadi informan dan narasumber dalam FGD dan wawancara mendalam ini terdiri dari internal Polri yaitu pada fungsi operasional kepolisisan antara lain: Intelkam, Binmas, Lalu Lintas, Sabhara dan Reskrim. Sementara unit eksternal terdiri dari perwakilan pemilik atau pimpinan usaha, perwakilan pemerintah dan perwakilan tokoh masyarakat.

Penelitian dilaksanakan pada 11 wilayah Polda sampel yang meliputi: Polda Sumatra Selatan, Polda Kalimantan Tengah, Polda Sumatra Barat, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Bali, Polda Kalimantan Utara, Polda Jawa Tengah, Polda Papua, Polda Metro Jaya, Polda Lampung dan Polda Maluku Utara..

HASIL

1. Kondisi Ekonomi Indonesia dan Potensi Gangguan Kamtibmas

Kondisi perekonomian Indonesia dapat dikatakan stabil ditengah perekonomian global yang melambat. Berdasarkan BPS pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 sebesar 5,05% (*year on year*) sementara tahun 2024 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 4,7% - 5,5%. Angka ini memberikan gambaran kegiatan perekonomian berjalan dengan normal sehingga kesejahteraan masyarakat juga diharapkan terus meningkat. Salah satu faktor yang memiliki peran agar kinerja perekonomian meningkat berupa terjaminnya stabilitas kamtibmas.

Peran aktif jajaran Polri dalam menjamin stabilitas kamtibmas menjadi perhatian pimpinan Polri. Sehingga penting untuk memahami kegiatan fungsi operasional Polri dalam pemulihan dan percepatan ekonomi. Untuk itu Puslitbang melakukan kegiatan penelitian dengan judul Peran Polri dalam Pemulihan dan Percepatan Ekonomi. Dilaksanakan berdasarkan keterwakilan regional (Jawa dan Luar Jawa) dan mempertimbangkan keragaman struktur perekonomian.

Dalam studi ini terlihat perbedaan kontribusi sektoral pembentuk perekonomian antara daerah di Jawa dan Luar Jawa. Kegiatan ekonomi berbasis jasa menjadi penggerak utama perekonomian di DKI Jakarta sementara Pariwisata menjadi penggerak utama perekonomian di daerah Bali. Selain itu sektor pertanian menjadi penggerak utama perekonomian di Provinsi Lampung sementara sektor pertambangan di Provinsi Papua dan Kalimantan Utara. Secara umum daerah di Pulau Jawa memiliki sumber perekonomian dari sektor perdagangan dan pengolahan. Sementara Luar Jawa memiliki sumber perekonomian dari sektor pertanian dan pertambangan.

Di daerah Pulau Sumatra (diwakili Provinsi Sumbar, Sumsel dan Lampung) perekonomian utama ada pada sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan. Sumbar dan Lampung memiliki kondisi perekonomian relatif sama karena didominasi sektor pertanian maka isu agraria/sengketa menjadi isu sensitif

Di daerah Pulau Kalimantan (diwakili Provinsi Kalteng dan Kaltara) perekonomian didominasi sektor primer yaitu sektor pertanian di Provinsi Kalteng (21,5%) dan pertambangan di Provinsi Kaltara (34,2%). Sehingga potensi konflik yang terjadi berupa konflik agraria/sengketa lahan.

Di daerah Pulau Jawa (diwakili Provinsi DKI Jakarta dan Jateng) perekonomian didominasi oleh sektor perdagangan di Provinsi DKI Jakarta (17,7%) dan industri pengolahan di Provinsi Jateng (34%). Sehingga potensi gangguan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini yaitu praktek pungli dan aksi premanisme

Di daerah Sulawesi Tenggara perekonomian didominasi oleh sektor pertanian (23%) dan pertambangan (21,4%). Dengan struktur perekonomian tersebut maka potensi konflik berupa sengketa lahan dan isu seputar persoalan lingkungan karena aktivitas tambang dan galian serta mengenai tenaga kerja asing yang yang lebih banyak dari pada pekerja lokal yang bekerja di kawasan industri dapat menimbulkan kecemburua sosial

Di daerah Papua perekonomian didominasi oleh sektor pertambangan (39,6%). Dengan komposisi seperti tersebut, maka sengketa tanah dapat menjadi potensi konflik.

Di daerah Maluku Utara perekonomian didominasi oleh sektor industri pengolahan (32,2%) dan daerah Bali didominasi oleh sektor pariwisata (19,9%). Berdasarkan kondisi perekonomian diatas maka daerah Provinsi Malut memiliki potensi gangguan kamtibmas berupa kesenjangan ekonomi dan pada Provinsi Bali memiliki potensi gangguan kamtibmas beruapa kegiatan warga asing yang mengganggu aktivitas sosial budaya lokal.

Penelitian ini melihat peran Polri dalam pemulihan dan percepatan ekonomi maka perlu memperhatikan tindak pidana yang menonjol. Dari 11 wilayah hukum lokasi penelitian, tindak pidana terindikasi banyak terjadi di wilayah dengan dominasi perekonomian pada sektor perdagangan dan industri pengolahan. Dalam hal ini, Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Tengah memiliki tingkat pidana tertinggi masing-masing 8,7% dan 8,1% terhadap total jumlah tindak pidana. Meskipun begitu, keduanya masih dibawah presentase tindak pidana yang terjadi di Polda Jawa Timur dan Sumatra Utara.

Agar tidak mengganggu statibitas kamtibmas maka perlu dilakukan tindakan penyelesaian hukum oleh kepolisian terhadap kasus tindak pidana. Sehingga penyelesaian tindak pidana menjadi indikator peran Polri dalam menjamin terwujudnya kamtibmas sehingga pembangunan ekonomi di suatu wilayah dapat terwujud. Hasil penelitian didapat Polda jawa Timur dan Jawa Tengah memiliki kemampuan penyelesaian kasus tindak pidana lebih tinggi dari yang lainnya. Untuk Polda yang memiliki penyelesaian kasus diatas rata-rata yaitu Polda Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara. Sementara Polda Metro Jaya masih berada dibawah nilai rata-rata nasional begitupun dengan Polda Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Kondisi geografis menjadi wilayah kerja Polda mempengaruhi pelaksanaan kegiatan kepolisian termasuk dalam pemulihan dan percepatan ekonomi. Sebagian besar wilayah polda yang menjadi objek penelitian meiliki wilayah darat, laut, gunung/perbukitan dan sungai/rawa. Hanya Polda Papua dan Maluku Utara yang tidak memiliki sungai/rawa. Kondisi ini mirip dengan wilayah pada Polda Sulawesi Tenggara, Bali, dan Kalimantan Utara. Polda Papua dan Polda Maluku Utara memiliki banyak gunung/perbukitan, mirip dengan Polda Sumatera Barat. Sementara Polda Lampung banyak terdapat sungai/rawa mirip dengan wilayah Polda Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

2. Peran Polisi Dalam Pemulihan Dan Percepatan Ekonomi Nasional.

Sebagai komitmen dalam mendukung kebijakan pemerintah, pimpinan Polri merancang program pemulihan dan percepatan ekonomi dalam enam belas program prioritas Kapolri. Maka perlu memperhatikan tantangan tiap fungsi operasional kepolisian (Intelkam, Binmas, Samapta, Lantas dan Reskrim).

a. Fungsi Intelkam

Kebijakan Kapolres yaitu penegakan hukum dan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan negara ditindaklanjuti dengan pemetaan permasalahan dilapangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi intelkam yaitu deteksi, penggalangan dan pengamanan atas potensi ganggungan kamtibmas pada sektor ekonomi. Dalam upaya preemtif dilakukan pendataan perkembangan harga bahan pokok, pemetaan daerah rawan yang mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat bekerja sama dengan Forkompimda. Dalam hal ini diperlukan pelatihan bagi personel untuk dapat memahami ancaman kamtibmas dalam bidang ekonomi beserta dengan perkembangan jenis dan model kejahatan ekonomi. Dalam upaya preventif dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan. Upaya preventif dilakukan dengan pemda berdasarkan analisis dan evaluasi untuk mendapatkan informasi masalah di masyarakat.

Contah pemetaan masalah yaitu pemetaan keberadaan kayu-kayu ilegal yang pada kegiatan Jumat Curhat dengan melibatkan Dinas LHK memberikan penjelasan prosedur peijinan seperti kayu-kayu hasil tanaman di pekarangan menjadi legal. Selain itu bagi pengusaha kayu didorong untuk mengurus perijinan agar produk kayu menjadi legal. Hasilnya pengusaha kayu (sawmill) di Pantai Juwata Laut produk kayu sudah legal, pengiriman dari Berau mendapat asistensi personel Polres Tarakan agar kayu tersebut legal.

Permasalahan kasus penipuan kualitas produk rumput laut di wilayah Polres Trakan yang mengakibatkan harga yang diterima petani rendah lalu ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan instansi terkait (Universitas Borneo dan Kementerian) untuk mendapatkan legalitas atas uji kadar air. Berdasar legalitas tersebut maka rumput laut masyarakat tidak lagi dihargai sewenang-wenang oleh pembeli.

Satintelkam Polresta Bulungan berkoordinasikan dengan Disperindagkom, MUI dan Dinkes untuk pelatihan sertifikasi halal berdasarkan informasi pulbaket. Sementara Jajaran Satintelkam Polres Metro Jakarta Barat melakukan pemetaan kendala yang dihadapi pelaku UMKM yaitu terdapat ormas dan preman yang meresahkan para pedagang. Selain itu pemukiman kumuh di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat berpotensi krimnalitas. Keberadaan pasar di daerah Jakarta Barat dan PD Pasar Jaya menghadapi pungli dan parkir liar. Untuk itu Satintelkam berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk memfasilitasi kegiatan yang melibatkan UMKM seperti kegiatan bazar, pameran, konser musik, dan lain-lain dengan mempermudah perijinan keramaian misal Satintelkam Polres Metro Depok dengan Disperindagkop dan Dinas UMKM melakukan kegiatan pembinaan kepada para pedagang UMKM.

b. Fungsi Binmas

Program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dalam bentuk program bantuan berupa bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi serta pemerintah daerah. Program bantuan tersebut dapat tersalurkan dengan baik dengan peran fungsi Binmas.

Di Polres Tarakan, salah satu bhabinkamtibmas melihat potensi budidaya rumput laut. Setelah melakukan sambang dan mengupayakan pemecahan masalah lalu dilakukan pembinaan yang berkorordinasi dengan Dinas Perindagkop sehingga rumput laut dapat diolah menjadi makanan ringan. Setelah itu Bhabinkamtibmas mendorong masyarakat untuk membuat Asosiasi Pengusaha Rumput Laut sebagai upaya pencegahan permainan harga oleh pihak tertentu.

Di Polres Malinau dengan pengetahuan Bhabinkamtibmas mengenai pakan ternak. Dengan kapasitas tersebut dilakukan pembinaan masyarakat untuk mengembangkan pakan ternak agar dapat digunakan selain menggunakan pakan dari pabrik. Sementara di Polres Bulungan, Bhabinkamtibmas memberikan pembinaan membuat kerupuk ikan dan baso ikan kepada masyarakat setelah melihat potensi perikanan yang cukup besar. Penyaluran KUR kepada masyarakat juga melibatkan Bhabinkamtibmas.

Di Polres Nunukan, Bhabinkamtibmas melakukan sambang kepada peternak dan agen ditributor untuk menindaklanjuti keluhan keterlambatan pupuk dan potensi UMKM makanan ringan sebagai oleh-oleh khas kabupaten Nunukan. Sementara Bhabinkamtibmas Polsek Sebatik Timur pernah berhasil mengubah potensi air nira aren dari tuak menjadi produksi gula aren.

Di Polres Mimika saat Operasi Rasaka Cartens, Bhabinkamtibmas melaksanakan pelatihan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan kepada masyarakat lokal. Program ini berhasil mengembangbiakkan babi setelah petugas bhabinkamtibmas mendapat pelatihan dari mentor yang didatangkan dari Jawa. Mantan Kapolres Mimika berhasil membangun peternakan ayam dan masih beropersi hingga kini. Lalu budidaya ikan mujair yang didampingi oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Mimika masih berjalan.

Di Polres Biak Numfor potensi masyarakat terletak pada perkebunana sayuran, ubi, cabe, buah untuk memasok kebutuhan masyarakat di Kabupaten Biak. Salah satau petugas bhabinkamtibmas mampu menggerakan masyarakat melalui kelompok tani,. Selain itu juga melakukan pengecekan ke distributor pupuk guna mengantisipasi permainan harga dan potensi kelangkaan.

Di Polres Metro Jakarta Barat dengan program Binmas Pioneer mengadakan program budidaya ikan nila, kebun sayur dan labu madu di lahan tidur milik perusahaan yang belum digunakan, budidaya magot dan pembuatan ecoenzym.

Di Polres Metro Bekasi mengadakan program budidaya perikanan dan persawahan. Petugas bhabinkamtibmas membentuk kelompok tani dan menggerakan PKK untuk menglah hasil perikanan. Kepala desa dibantu petugas bhabinkamtibmas mendirikan SMK di Desa Jatibaru Kecamatan Cikarang Timur dan lulusan disalurkan ke perusahaan industri didaerah tersebut, budidaya ikan dengan memanfaatkan lubang galian di tanah milik perusahaan dan

membangun kios kuliner disekitar kolam, pembangunan Taman Limo untuk menampung UMKM kuliner. Sementara itu Polres Metro Bekasi Kota melakukan revitalisasi danau menjadi tempat rekreasi di Desa Cipecang dan Membangun Kampung Harapan Jaya menjadi destinasi wisata Kampung Bali.

Di Polres Metro Depok, petugas bhabinkamtibmas yang hampir 30 tahun menekuni kebun buah belimbing melakuakan pemberdayaan masyarakat melalui budidaya tanaman belimbing, melakukan revitalisasi saluran irigasi sekaligus dijadikan tempat budidaya ikan, melakukan pemberdayaan karang taruna untuk memperindah lingkungan kolam dan melakukan pemberdayaan ibu-ibu dengan merintis usaha keripik herbal.

Agar kemampuan dan kapasitas Bhabinkamtibmas dapat terpenuhi maka penting diupayakan mekanisme pembekalan/pelatihan atau pembekalan di luar tugas pokok keamanan. Sebagai informasi bahwa ada catatan sejarah Binmas Pioneer di Polda Papua dimana pada tahun 1997 para casis SPN selama 1 bulan diterjunkan ke dusun-dusun untuk praktek langsung pertanian dan peternakan. Namun program tersebut hanya bertahan hingga 1999 saja

c. Fungsi Sabhara

Kegiatan patroli dapat dikatakan telah dijalankan oleh jajaran fungsi Sabhara baik berupa kegiatan patroli dialogis maupun kemitraan. Keberadaan kegiatan ekonomi yang terkatagori sebagai obyek vital (seperti kantor pemerintahan, perbankan, pelabuhan laut dan udara) membutuhkan kehadiran fungsi Sabhara. Namun dalam menjalankan kegiatan patroli Sabhara masih dihadapkan pada kendala geografis di beberapa wilayah yang berimplikasi dukungan sarana prasarana.

Kondisi tingkat kerawanan gangguan keamanan di berbagai wilayah kerja kepolisian berbeda-beda, sehingga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk menjadi dasar pergelaran kegiatan patroli jajaran Sabhara. Koordinasi dilakukan berdasarkan data kerawanan gangguan keamanan wilayah (saat kegiatan patroli) yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan Polres. Berdasar kegiatan yang dijalankan tersebut maka pimpinan Polres akan memberikan arahan sebagai langkah preventif/pencegahan dengan tujuan stabilitas kambtibmas sehingga tidak mengganggu kegiatan perekonomian wilayah.

d. Fungsi Lalu Lintas

Keterlibatan jajaran fungsi lalu lintas dalam upaya pemulihan dan percepatan ekonomi nasional mengarah pengaturan mobilitas barang dan orang. Kegiatan yang dijalankan jajaran fungsi lalu lintas menjalankan tugas preemtif berupa pendataan dan pemetaan ancaman gangguan kamtibmas terkait angkutan barang dan orang. Tindaklanjut pendataan menjadi dasar untuk menjalankan operasi rutin agar berbagai potensi pengganggu yang berdampak terhadap kelancaran distribusi barang dan mobilitas orang tidak terjadi.

Arahan dan sosialisasi yang diberikan pimpinan tidak terjadi di seluruh kepolisian tingkat wilayah. Hal ini berimplikasi pada variasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan fungsi lalu lintas yang ada di tingkat Polda/Polres di sejumlah daerah. Menariknya, meski belum menerima arahan, fungsi lalu lintas dalam melakukan kegiatan menjalankan rutinitas sesuai tugas dan fungsi, dimana kondisi kelancaran mobilitas barang dan orang terutama bahan pokok penting dan BBM tidak menjadi kendala. Realitas ini menggambarkan bahwa kegiatan yang dijakankan fungsi lalu lintas telah menjadi bagian dari upaya pemulihan dan percepatan ekonomi. Dalam melaksanakan kegiatan preventif tersebut juga dilakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Kepala Terminal, Organda, dan lain-lain.

Tantangan yang ditemui dalam menjamin kelancaran mobilitas angkutan barang adalah kondisi jalan rusak dan kemacetan di beberapa titik pasar tumpah, dan kecelakaan pada jalur-jalur tanjakan/tikungan yang berdampak pada kelancaran distribusi logistik.

Penegakan hukum fungsi lalu lintas dilaksanakan berupa penerbitan bukti pelanggaran (tilang) pada pengendara kendaraan yang terbukti secara jelas tidak mematuhi aturan lalu lintas. Selanjutnya, penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, ada beberapa Polres yang menjalankannya. Sebagai gambaran, Polres Kolaka menjalankan penyelesaian melalui *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas terkecuali untuk perkara yang menimbulkan korban luka berat maupun korban meninggal dunia. Polresta

Denpasar juga menjalankan hal serupa. Salah satu alasannya karena angka kecelakaan lalu lintas di Kota Denpasar tergolong relatif tinggi.

e. Fungsi Reskrim

Tidak pidana yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian wilayah salah satunya penyalahgunaan BBM bersubsidi. Bahkan penindakan atas penyalahgunaan niaga gas LPG bersubsidi dengan mengoplos gas LPG 3 kg ke dalam kemasan 12 kg juga dilakukan, termasuk penanganan tidak pidana mengurangi volume beras bantuan yang seharusnya kemasan 5 kg namun dikurangi menjadi 4 kg.

Penindakan hukum lainnya di bidang ekonomi yang pernah dilakukan oleh fungsi reskrim antara lain penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan, penyidikan kasus tambang illegal, penanganan kasus pertanahan yang terkait pemalsuan atas hak, penanganan kasus TPPO yang yaitu pengiriman TKI ke Thailand namun dipekerjakan ke Myanmar, dan lain-lain.

Pengaduan atas kejahatan non tradisional (penipuan online, judi online, dan arisan online) telah dilaporkan oleh masyarakat, namun sejauh ini jajaran kepolisian tingkat Polres masih belum dapat melakukan penindakan karena sulit mengidentifikasi keberadaan pelaku dan terkendalanya birokrasi dalam permintaan data transaksi keuangan bank.

Fungsi reskrim melalui Satgas Pangan Pemda melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain menjalankan rapat koordinasi yang diselenggarakan Kemendagri (lintas *stakeholder*/pemangku kepentingan) terkait pengendalian inflasi daerah (TPID) melalui sarana zoom meeting setiap hari senin.

Dalam melakukan sosialisasi/edikasi kepada masyarakat perlu juga dilakukan dengan kerjasama dengan para pihak (seperti kejaksaan dan atau polisi pamong praja). Penanganan tindak pidana yang berdampak terhadap kegiatan ekonomi, di beberapa kepolisian wilayah telah dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*. Penanganan tindak pidana arisan online yang telah terindikasi kuat pelaku dan terbukti maka penanganan dilakukan dengan *restorative justice*, karena pelaku bersedia mengembalikan kerugian yang dialami beberapa korban

3. Ekspektasi Masyarakat Terhadap Peran Polri dalam Pemulihan dan Percepatan Ekonomi

Ekspektasi masyarakat merupakan pintu masuk untuk melihat sejauhmana dinamika faktor ekonomi dalam beraktivitas karena masyarakat memiliki peran ganda berupa penerima manfaat dari stabilitas kamtibmas dan pertumbuhan ekonomi dan disaat bersamaan juga sebagai pelaku kamtibmas dan ekonomi. Survei ekspektasi masyarakat melalui survei memanfaatkan metode *purposive random sampling*, dimana unit analisis masyarakat sudah ditentukan melalui keterwakilan pemilik usaha/pengambil kebijakan di dalam usaha, pemerintah daerah (pemda) dan tokoh masyarakat/adat/agama/pemuda.

a. Gambaran dan Karakteristik Masyarakat

Survei terdiri atas 2.078 responden lolos uji. Dengan syarat jumlah sampel keterwakilan seluruh wilayah diatas 100 untuk setiap wilayah polda sudah terpenuhi. Secara umum, gambaran ekspektasi masyarakat dibangun melalui informasi dari dunia usaha 59,47 persen (1.236 responden), pemerintah daerah 22,61 persen (470 responden) dan tokoh masyarakat 17,90 persen (372 responen). Potret tersebut relatif representatif mewakili aktor utama dari aktifitas ekonomi yaitu pelaku usaha dan pekerja. Terlebih, sisi kelancaran dan keberhasilan program pemerintah berbasis pengembangan ekonomi juga dapat tercermin cukup baik. Dalam hal ini, kontrol aktor sangat diperlukan guna menjaga keabsahan dan objektivitas informasi dari dunia usaha dan pemerintah daerah dimana jumlah sampel tokoh masyarakat sudah melampaui dari kebutuhan. Lebih jauh, karakteristik ekonomi kewilayahan lokus penelitian cukup menjanjikan untuk analisis lebih lanjut. Kondisi tersebut mampu memberikan pemahaman pembentukan ekspektasi berdasar karakteristik sosio-ekonomi dimana para responden bertempat tinggal dan beraktifitas.

Sejumlah 69,81% responden berada di wilayah kerja Polres atau setara kabupaten (pedesaan) dan lainnya berada di wilayah kerja Polresta atau setara Kota. Kemudian lokus kajian sebesar 64,15% memiliki sumber pertumbuhan ekonomi berasal dari sektor primer dan sekunder, pertanian, pertambangan dan pengolahan sementara lainnya berada pada

sektor jasa. Pola tersebut diharapkan mampu memberikan dasar prasyarat untuk generalisasi analisis secara nasional

b. Ekspektasi Rasional Masyarakat Terhadap Peran Polri

Secara khusus, masyarakat dengan pilihan rasional mereka mempercayai dan meyakini bahwa Polri perlu mengambil peran dalam relasi stabilitas kamtibmas dan upaya pemulihan dan percepatan perekonomian. Keyakinan tersebut merupakan cerminan ekspektasi rasional dimana dibangun berdasar persepsi pengalaman dan harapan masyarakat.

Berdasar ekspektasi masyarakat melalui pilihan rasional mereka, sejumlah 53,24% berharap bahwa Polri tidak hanya menjalankan fungsi pemangku kepentingan kamtibmas tetapi juga lebih jauh terlibat dalam upaya pemulihan dan percepatan ekonomi. Di sisi lain, 46,76% masyarakat berekspektasi bahwa relasi kamtibmas dan ekonomi akan berjalan secara alami.

Kata kunci dalam relasi kamtibmas dan perekonomian yanng didapat saat FGD yaitu inflasi, harga dan beras merepresentasikan pengetahuan masyarakat atas peran Polri yang saat ini sedang berjalan yaitu sebagai bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan satgas pangan. Selain itu ada perusahaan, UMKM, pasar dan potensi daerah yang dipahami sebagai harapan masyarakat atas perluasan tugas Polri untuk menjangkau elemen-elemen tersebut. Artinya, proses pemulihan dan percepatan ekonomi memang dirasa mampu berkontribusi pada penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

c. Determinan Pembentuk Ekspektasi Masyarakat

Variabel ekspektasi masyarakat disusun dan dikontrol berdasar elemen-elemen tugas pokok dan fungsi dari Polri. Tugas pokok dan fungsi terbagi menjadi 7 elemen utama. Hal ini dilakukan untuk mensinergikan pengalaman, persepsi dan harapan masyarakat dengan titik mula dari observasi kinerja Polri ketika pandemi terjadi.

Berdasarkan hasil perhitungan AHP, tersusun peringkat prioritas tugas Polri berdasarkan tingkat kepentingannya. Pengamanan kegiatan masyarakat menempati urutan paling utama di dalam harapan masyarakat dengan nilai 10,5%. Penindakan kejahatan ekonomi menduduki peringkat dua sebesar 10,4%. Kedua peringkat itu memiliki selisih angka yang sangat kecil. Kemudian, deteksi dini potensi gangguan kamtibmas dan pembinaan ekonomi masyarakat lokal menempati urutan ketiga 7,23% dan keempat 7,02%.

Ekspektasi area penguatan terbagi menjadi empat kluster penentu harapan masyarakat kepada Polri berbasis nilai yang relatif dekat. Klaster pertama (1), yaitu pengamanan kegiatan ekonomi masyarakat dan penindakan kejahatan ekonomi merupakan kombinasi jenis operasional preventif dan penegakkan hukum. Sementara itu, deteksi potensi gangguan kamtibmas dan pembinaan ekonomi di masyarakat sebagai komponen klaster kedua (2) dimana kombinasi operasional preemtif dan preventif. Klaster ketiga (3) tersusun dari kombinasi operasional preemptif dan preventif dimana terdiri dari penanganan unjuk rasa yang menganggu aktivitas ekonomi, informasi potensi gangguan dan pencegahan dini potensi gangguan kamtibmas. Klaster terakhir (4) merupakan kombinasi pengaturan lalu lintas di pusat kegiatan ekonomi (preventif) dan penindakan pelanggaran lalu lintas (gakkum).

Namun, kondisi optimum akan terjadi jika sifat *ex-post* dalam konstruksi berpikir masyarakat dapat turut serta didorong. Di titik ini kesempatan Polri dalam mewujudkan harapan masyarakat tersebut berpeluang memiliki dampak lebih kuat dan luas, ketika langkah strategis yang diambil juga mampu merangsang sifat *ex-post* tersebut.

Sebagai kontrol rasionalitas ekspektasi atas peran Polri, perlu melihat persepsi masyarakat terhadap stabilitas kamtibmas yang diperlukan bagi upaya pemulihan dan percepatan ekonomi. Berdasarkan bobot global dari analisis AHP, sejumlah 52,46% masyarakat memilih rasa aman dalam aktivitas ekonomi sehari-hari sebagai determinan utama kamtibmas. Peringkat berikutnya diikuti oleh rendahnya kriminalitas, fasilitas publik terjaga dan kepastian penegakan hukum sebesar 26,69 persen, 12,58 persen dan 8,26 persen berturut-turut.

Berdasarkan pilihan-pilihan indikator faktor stabilitas kamtibmas nasional, preferensi terbesar mencapai 31,18% terletak pada indikator keberadaan pengganggguran usia muda. Kemudian, indikator kesenjangan pendapatan, dan kemiskinan dan kawasan kumuh menempati peringkat 2 dan 3 sejumlah 15,37% dan 14,06%.

SIMPULAN

Program pemerintah tentang pemulihan dan percepatan ekonomi akan terkait erat dengan stabilitas kamtibmas, sehingga kepolisian memiliki kewajiban untuk mewujudkan stabilitas kamtibmas. Dalam menjalankan komitmen tersebut fungsi operasional kepolisian tingkat wilayah berdasar hasil kajian menghadapi beberapa tantangan internal, sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan setiap fungsi operasional masih belum terarah kepada kegiatan yang mengkait dengan peningkatan perekonomian. Hal tersebut terjadi karena minimnya arahan tertulis dari Pembina Fungsi atas kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung pemulihan dan percepatan ekonomi;
b. Keterkaitan kegiatan yang dilakukan fungsi operasional kepolisian, secara rasional oleh masyarakat dinilai penting. Sesuai kondisi yang ada, masyarakat berpandangan kegiatan yang dijalankan fungsi operasional kepolisian telah memberikan jaminan kamtibmas dalam kegiatan usaha. Hal tersebut didasarkan pada hasil perhitungan kuantitatif atas ekspektasi masyarakat dimana 46,76% menilai hubungan kamtibmas dan pemulihan ekonomi berjalan sesuai kondisi tantangan yang ada telah dapat di tangani;
c. Pelibatan jajaran kepolisian untuk menjalankan pemulihan dan percepatan ekonomi membutuhkan koordinasi dan kolaborasi baik antar fungsi operasional maupun dengan para pemangku kepentingan lain. Hal ini menjadi penting karena solusi permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat tidak dapat terselesaikan hanya oleh jajaran kepolisian wilayah;
d. Keterlibatan jajaran kepolisian (fungsi operasional) dalam pemulihan dan percepatan ekonomi harus di imbangi dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota. Kompleksitas tugas dan kewenangan membutuhkan pemahaman anggota kepolisian terkait berbagai kegiatan yang dijalankan berdasar tugas pokok fungsi dan disesuaikan karasteristik wilayah.

Selain empat hal di atas, fungsi operasional kepolisian juga perlu memperhatikan tantangan eksternal. Tantangan tersebut bila tidak dikelola sesuai tugas pokok fungsi akan mengakibatkan potensi gangguan kamtibmas yang menggangu pemulihan dan percepatan ekonomi wilayah. Tantangan yang memerlukan peran aktif jajaran kepolisian antara lain:

a. Terjaminnya rasa aman dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari dipadang oleh masyarakat sebagai faktor penting terkait stabilitas kamtibmas. Kegiatan yang dijalankan fungsi operasional kepolisian dalam tugas dan fungsi pokok terkait pemulihan dan percepatan ekonomi harus mewujudkan secara nyata rasa aman. Dengan terjaminya rasa aman maka kegiatan usaha produktif berbasis potensi wilayah akan dapat dioptimalkan;
b. Pemulihan dan percepatan ekonomi di beberapa wilayah mengindikasikan tantangan berupa potensi gangguan keamanan yang diakibatkan pengangguran usia muda. Keberadaan pengangguran usia muda dapat berkorelasi terhadap potensi kriminalitas. Kehadiran jajaran kepolisian dengan menjalankan fungsi preemtif dan preventif perlu dilakukan sesuai tugas pokok setiap fungsi operasional;

Kondisi kependudukan Indonesia saat ini telah memasuki era bonus demografi, dimana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia produktif sebagian besar berusia muda, namun pasar tenaga kerja belum mampu menyerap penduduk usia produktif berusia muda secara optimal sehingga Pengangguran usia muda perlu menjadi perhatian karena berpotensi dalam mengaggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Didasarkan pada hal tersebut, berbagai hal yang perlu dilakukan oleh fungsi operasional, antara lain:

a. Fungsi Intelkam
    1. Menyusun panduan teknis pemulihan dan percepatan ekonomi nasional bidang intelkam;
    2. Memfasilitasi pelaku usaha dalam pengurusan administrasi, perijinan, atau konsultasi permasalahan di lapangan ke instansi terkait;
    3. Melakukan deteksi terhadap kejahatan ekonomi maupun kejahatan konvensional dan non konvensional yang berdampak pada ekonomi masyarakat;
    4. Berperan aktif dalam mencegah potensi pelanggaran yang mengarah pidana terhadap aktifitas perekonomian illegal menjadi legal yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan sehingga mampu mendorong kegiatan perkonomian masyarakat yang legal;

5. Memfasilitasi UMKM dalam pemasaran produk secara online agar UMKM memiliki daya saing sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan UMKM;
6. Melakukan penggalangan intelijen kepada elemen masyarakat yang inovatif dan implementatif yang sejalan dengan dinamika masyarakat guna meminimalisir ancaman gangguan kamtibmas bidang ekonomi;
7. Mengoptimalkan pemetaan potensi ekonomi yang dapat dikembangan melalui kerjasama dengan instansi terkait termasuk masyarakat guna mendorong kemajuan perekonomian wilayah;
8. Melakukan sinkronisasi kebijakan Polri dengan program pemerintah daerah sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya pelaku usaha;
9. Melaksanakan pelatihan/dikjur spesialisasi atau bimtek dengan menghadirkan ahli/narasumber terkait bidang ekonomi guna meningkatkan kemampuan personel untuk mendeteksi permasalahan kamtibmas terkait ekonomi.

b. Fungsi Binmas
   1. Menyusun petunjuk teknis pemulihan dan percepatan ekonomi nasional bidang Binmas;
   2. Menyusun buku panduan/buku saku untuk personel polisi guna memudahkan dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pemulihan dan percepatan ekonomi nasional;
   3. Melakukan sosialisasi terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional kepada anggota sehingga anggota dapat memahami dan dapat menjabarkan pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik;
   4. Melakukan pemetaan potensi ekonomi dan pariwisata yang dapat digarap untuk menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
   5. Memberikan edukasi kepada masyarakat/pelaku usaha untuk berkreatif dan inovatif dalam mengelola usaha ekonomi untuk makin berkembang serta memiliki daya saing;
   6. Memperluas implementasi konsep “problem solving” tidak hanya terbatas permasalahan sosial terkait kamtibmas namun juga permasalahan ekonomi di masyarakat khususnya terkait kesejahteraan masyarakat;
   7. Mengalokasikan dukungan anggaran untuk mendukung kegiatan program pemulihan dan percepatan ekonomi nasional;
   8. Melaksanakan pelatihan khusus kepada personel Polri dalam penguasaan teknologi baik di bidang pertanian, perdagangan dan lain sebagainya sehingga dapat memudahan dalam mengedukasi masyarakat agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat itu sendiri;
   9. Memprioritaskan rekruitmen personel Polri dengan latar belakang SMK kejuruan seperti pertanian, perikanan agar mereka lebih siap terjun ke masyarakat dan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi wilayah guna mendorong dan meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat;
   10. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan personel tentang wirausaha agar mampu membaca peluang usaha wilayah/lingkungan;
   11. Membangun dan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Sat Binmas dengan instansi terkait melalui kerjasama dengan dinas terkait dalam mengembangkan potensi ekonomi di desa dimana selama ini masih dilakukan secara individu oleh Bhabinkamtibmas, belum tersentralisasi di Satbinmas/polres;
   12. Meningkatkan sinergitas pilar polmas khususnya pelibatan tokoh masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pembinaan ekonomi masyarakat.

c. Fungsi Sabhara
   1. Menyusun petunjuk teknis pemulihan dan percepatan ekonomi nasional bidang sabhara;
   2. Melakukan pendataan dan pemetaan sentra ekonomi, aktifitas ekonomi wilayah guna mengoptimalkan kegiatan patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat;
   3. Membangun kedekatan masyarakat dengan polisi khususnya jajaran samapta guna meminimalisir potensi gangguan kamtibmas yang dapat mengganggu aktifitas perekonomian wilayah. Patroli dialogis dengan sasaran pelaku usaha menjadi atensi bagi jajaran fungsi samapta;
   4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas personel dan peralatan yang memadai untuk mendukung pengamanan obyek vital, obyek vital nasional maupun proyek strategis nasional;

5. Membangun kerjasama dengan instansi terkait dalam pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggar hukum;
6. Menyediakan media atau sarana yang mempermudah masyarakat menyampaikan informasi atau memerlukan bantuan khususnya pelaku usaha.

d. Fungsi Lalu Lintas
   1. Menyusun petunjuk teknis pemulihan dan percepatan ekonomi bidang fungsi lalu lintas;
   2. Melakukan pendataan dan pemetaan pelaku usaha sektor transportasi yang berperan dalam kelancaran distribusi termasuk yang berpotensi mengganggu kelancaran distribusi belum secara maksimal dilakukan oleh jajaran fungsi lalu lintas;
   3. Melakukan penindakan secara terpadu dengan instansi terkait terhadap kendaraan ODOL (Over Dimension Ovel Load) belum seluruhnya dilakukan oleh jajaran lalu lintas. Penindakan yang dilakukan juga belum optimal karena adanya intervensi internal maupun eksternal;
   4. Melakukan sosialisasi/edukasi safety riding kepada pelaku usaha sektor transportasi khususnya kendaraan angkutan barang yang berpotensi ODOL dan lintas wilayah belum optimal termasuk upaya pencegahan melalui pemasangan rambu-rambu peringatan di jalan yang rawan (tanjakan, turunan, tikungan);
   5. Meningkatkan koordinasi dan memperkuat peran Forum Lalu Lintas dalam penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas;
   6. Membangun dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi kelancaran lalu lintas termasuk mengantisipasi keberadaan kendaraan ODOL di jalan yang membahayakan, perlu dukungan jajaran fungsi lalu lintas dengan menyediakan media pengaduan seperti hotline, nomor WA, dan lain-lain.

e. Fungsi Reskrim
   1. Menyusun petunjuk teknis pemulihan dan percepatan ekonomi nasional bidang reskrim;
   2. Melakukan sosialisasi/edukasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terkait maraknya kejahatan ekonomi dengan berbagai modus guna meminimalisir korban-korban baru bermunculan;
   3. Mengoptimalkan keberadaan Kring Serse sangat positif dalam mendeteksi terjadinya kriminalitas khususnya kejahatan ekonomi di masyarakat. Kring serse hendaknya juga berfungsi sebagai sarana atau media bagi masyarakat untuk berkonsultasi atau menyampaikan informasi gangguan kamtibmas;
   4. Memperkuat peran fungsi reskrim tidak hanya pada pengawasan distribusi bahan pokok penting namun lebih pada penanganan kejahatan ekonomi atau kejahatan yang berdampak pada ekonomi masyarakat;
   5. Mengoptimalkan keberadaan Patroli Siber belum optimal dalam mendeteksi kegiatan judi online, prostitusi online, investasi illegal, penipuan online;
   6. Memperkuat fungsi pendampingan penggunaan dana desa (atau sejenisnya) dibandingkan penindakan/penegakan hukum;
   7. Mendorong penerapan Restorative Justice terhadap perkara pidana tertentu/kejahatan ekonomi guna meminimalisir kerugian finansial korban kejahatan ekonomi;
   8. Meningkatkan kemampuan penyidik dan peralatan pendukung Teknologi informasi dalam menangani kejahatan ekonomi khususnya yang bersifat siber. Namun demikian penanganan terhadap kejahatan konvensional seperti penipuan, penggelapan, curanmor yang sangat berdampak pada ekonomi masyarakat juga memerlukan perhatian khusus;
   9. Menyediakan nomor kontak yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan masukan maupun pengaduan tentang potensi kejahatan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, D. A. (2022). *The Cost of Crime By David A. Anderson*. *January 2012*. https://doi.org/10.1561/0700000047

Czabanski, J. (2008). Estimates of Cost of Crime. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Forman, E. H. & Saul I. G. (2001). "*The analytical hierarchy process—an exposition*". *Operations Research*. Vol. 49, No. 4: hal. 469–487. doi: http://www.jstor.org/stable/3088581

Goulas, E., & Zervoyianni, A. (2015). *Economic growth and crime: Is there an asymmetric* relationship? *Economic Modelling*, *49*, 286–295. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.04.014

Gould E., Weinberg B., & Mustard, D. 2002. "*Crime Rates and Local Labor Market Opportunities in the United States*: 1979–1995", Review of Economics and Statistics, Vol. 84, No. 1, Hal. 45-61

Kusmanto, Heru (2016), Mewujudkan Stabilitas Keamanan Mendukung Pertumbuhan EkonomiNasional,https: //jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/137/57.

Karnavian, Tito (2018), Ekonomi Dan Keamanan Kunci Penting Kemajuan Indonesia, https://www.umy.ac.id/menkeu-kapolri-ekonomi-dan-keamanan-kunci-penting-kemajuan-indonesia.

Marenin, O. (2014). Styles of policing and economic development in African states. *Public Administration and Development*, *34*(3), 149–161. https://doi.org/10.1002/pad.1683

Owens, E., & Ba, B. A. (2021). *The Economics of Policing and Public Safety*. *Journal of Economic Perspectives*, *35*(4), 3–28. https://doi.org/10.1257/jep.35.4.3

Pratiwi, Yenni Ratna (2022), Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html.

Raphael S., & Winter-Ebmer, R. 2001. "*Identifying the Effect of Unemployment on Crime*", Journal of Law and Economics, Vol. 44, No. 1, Hal 259-283

Saaty, T. L. (1986). "*Axiomatic Foundation of the Analytic Hierarchy Process*". *Management Science*, Vol. 32, No. 7, hal. 841–855. http://www.jstor.org/stable/2631765

Saaty, T. L. (2008). "Relative Measurement and its Generalization in Decision Making: Why Pairwise Comparisons are Central in Mathematics for the Measurement of Intangible Factors – The Analytic Hierarchy/Network Process". *Review of the Royal Academy of Exact, Physical and Natural Sciences*, *Series A: Mathematics*. Vol. 102, No. 2: hal. 251–318. doi: https://doi.org/10.1007/BF03191825

World Bank (2020), COVID-19 to Plunge Global Economy into Worst Recession since World War II, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii.